

SEJARAWAN
Dalam Pusaran
KEISTIMEWAAN

Biografi Djoko Suryo

"Pak Djoko Suryo adalah sosok yang sangat gigih terutama dalam hal memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta." -Haidar Musyafa, Penulis Buku Api Republik (Biografi Sultan HB IX)

"Djoko Suryo merupakan sosok abdi dalem yang selalu memberikan informasi positif mengenai Sri Sultan HB IX maupun Kasultanan Yogyakarta" - KRT. Jati Ningrat, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta.

"Bapak seorang ayah yang sangat sabar. Bahkan kedekatan dengan anak-anaknya layaknya ayah sekaligus sahabat" - Harko, Putra Sulung Djoko Suryo.

"Pak Djoko sebagai dosen mampu menjadi fasilitator, dinamisator, serta inspirator" - Wahjudi, Mahasiswa Djoko Suryo.



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI KEARSIPAN

SEJARAWAN
Dalam Pusaran
KEISTIMEWAAN

Aulia Nurisyana A., dkk.

Aulia Nurisyana A., dkk.

SEJARAWAN
Dalam Pusaran
KEISTIMEWAAN

Biografi Djoko Suryo



SEJARAWAN

Dalam Pusaran

KEISTIMEWAAN

Biografi Djoko Suryo

Penulis :

1. **Aulia Nurisyana Arkanti** (17/416377/SV/14115)
2. **Dinda Lusiana** (17/415543/SV/13408)
3. **Dwidha Surya Prakasa** (17/416382/SV/14120)
4. **Fitri Yuli Angraini** (17/410874/SV/12801)
5. **Hadyan Fikri Rosyadi** (17/415547/SV/13412)
6. **Inggar Rahmi Irwanti** (17/416391/SV/14129)
7. **Intan Ramadhanti** (17/416392/SV/14130)

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
1. Pekalongan 1939	1
2. Menuju Yogyakarta	5
3. Mengasah Kompetensi Menebar Inspirasi	11
4. Sejarawan Dalam Pusaran Keistimewaan	36
a. Djoko Suryo dan Keistimewaan Yogyakarta	36
b. Pro Kontra Keistimewaan	50
5. Djoko di Mata Keluarga dan Mahasiswanya	59
a. Djoko Suryo di Mata Keluarga	59
b. Djoko Suryo di Mata Mahasiswanya	63
Tentang Penulis	68
Daftar Pertanyaan Wawancara	80
Penutup	82
Lampiran	84
a. Foto	84
b. Foto Surat Pengantar	90

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku biografi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Dokumentasi dan Publikasi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Kearsipan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2017/2018.

Puji serta syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan buku biografi ini dengan tepat pada waktunya. Buku ini berhasil tersusun berkat kerjasama dalam kelompok yang sangat baik, dan berkat bantuan dari pihak-pihak lain yang senantiasa membantu kami.

Buku ini kami buat untuk melestarikan budaya yang telah diperjuangkan oleh para sejarawan. Buku biografi ini kami buat untuk memberikan wawasan tambahan kepada para pembaca mengenai kehidupan seorang sejarawan, Prof. Djoko Suryo.

Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Djoko Suryo selaku narasumber utama kami.
2. KRT. Jatiningrat, Bapak Harko, dan Haidar Mustofa selaku narasumber sekunder.
3. Bapak Waluyo, S.S., M. Hum selaku Kaprodi Kearsipan.

4. Bapak Wahjudi Djaja, S.S., M.Pd selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Dokumentasi dan Publikasi.
5. Teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

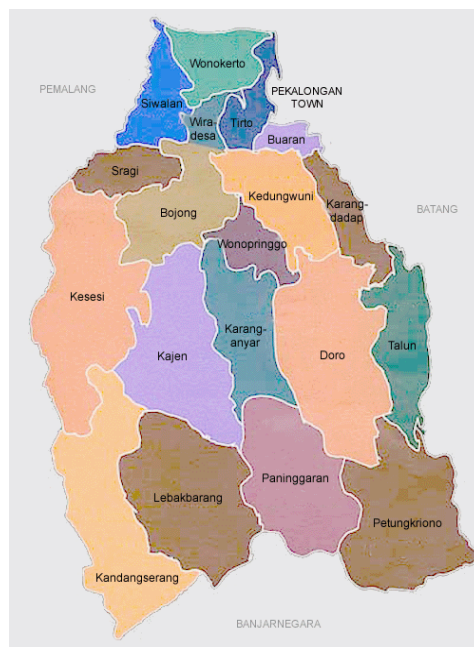
Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan buku biografi ini, tetapi penulis meyakini bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat.

Akhir kata guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan.

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Penulis

Pekalongan 1939



1.1. Peta Kabupaten Pekalongan

Pekalongan, kota yang berada di sebelah barat Semarang dan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara ini menyimpan segudang kebudayaan, salah satunya ialah batik. Kota ini juga mendapat julukan Kota Batik karena disinilah muncul batik dengan berbagai macam corak yang khas dan variatif. Tidak ada yang tahu

secara pasti kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, karena tak ada catatan resmi mengenai perkembangan Batik Pekalongan. Namun diperkirakan batik berkembang di Pekalongan sejak tahun 1800.

Pada tahun 1939, di kota ini pula berdiri dua koperasi batik yaitu Koperasi Batik Setono dan Koperasi Batik Pekajangan. Kedua koperasi batik ini tidak memiliki perbedaan dalam produksinya, namun hanya lokasinya saja yang berbeda. Sebelum didirikan kedua koperasi batik ini, dahulu terdapat industri pembuatan stagen. Industri ini didirikan pada tahun 1922, lalu memasuki masa peralihan penjajahan Belanda ke Jepang, industri tersebut berubah menjadi industri batik. Koperasi Batik Setono dan Pekajangan memiliki anggota yang sama-sama banyak.

Tujuan didirikan koperasi batik ini tentunya untuk menghadapi persaingan dengan pengusaha Tionghoa. Persaingan yang dihadapi ialah persaingan perdagangan. Namun, setelah didirikan kedua koperasi batik ini, eksistensi industri dari kalangan pengusaha Tionghoa mulai redup dikarenakan kalah dalam persaingan pasar. Dengan adanya koperasi batik di Setono dan Pekajangan, anggota koperasi dapat dengan mudah dalam

memasarkan hasil produksinya. Hasil produksi batik di distribusikan ke beberapa daerah, contohnya Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Selain terkenal dengan batiknya, kota di timur Kabupaten Batang ini juga terkenal dengan budaya santrinya. Terdapat puluhan pondok pesantren dengan berbagai macam pola pengajaran didirikan disini.

Pada tahun yang sama pula, tepatnya tanggal 30 Desember lahir seorang anak laki-laki dari rahim seorang ibu bernama Siti Chodidjah di Desa Kutosari yang diberi nama Djoko Suryo. Ayah Djoko Suryo bernama Sjaba'an. Keluarga Djoko hidup sederhana di sebuah Desa Kutosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Lahir pada saat peralihan penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang memaksa Indonesia berada dalam kondisi yang serba terbatas, termasuk desa tempat Djoko lahir.

Sang ayah bekerja sebagai seorang petani dan merangkap sebagai pamong desa membentuk Djoko sebagai pribadi yang terus bersyukur dan menjunjung tinggi agamanya. Djoko dibesarkan di lingkungan pesantren dengan kedisiplinan yang tinggi, tak heran dari

sini pula yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan Djoko. Tak hanya diajarkan tentang agama, Djoko juga menimba ilmu di sekolah umum seperti kebanyakan anak lainnya, yang membedakan hanyalah setiap pulang sekolah Djoko harus mengikuti pendidikan madrasah.

Djoko menempuh pendidikan madrasah di pesantren yang masih ada di lingkungannya. Pesantren tersebut bernama Juwah. Ayah Djoko, Sjabar'an, merupakan orang yang sangat disiplin, ia mengharapkan Djoko agar menjadi seorang guru, tak heran ia memberikan Djoko ilmu di sekolah umum agar Djoko mempunyai pengetahuan yang luas dan ilmu agama yang baik yang didapat melewati pendidikan madrasah.

Menuju Yogyakarta



2.1 Lokasi Sekolah Guru A (SGA) Yogyakarta yang sekarang menjadi SMA 11 Yogyakarta.

(Fotografer: Hadyan Fikri Rosyadi)

Pendidikan Djoko dimulai ketika dia bersekolah di Sekolah Rakyat Karanganyar atau sekarang setingkat Sekolah Dasar (SD) dan lulus pada tahun 1953. Setelah lulus dari Sekolah Rakyat Karanganyar, Djoko melanjutkan ke Sekolah Guru B (SGB) atau setingkat SMP di Wiradesa, Karanganyar dan lulus tahun 1956.

Karena Djoko sangat berprestasi saat di Sekolah Guru B, gurunya menyarankan agar melanjutkan ke Sekolah Guru A (SGA) di Yogyakarta. Pada saat itu Sekolah Guru A hanya ada tiga, yaitu di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Ia memiliki keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru A yang berada di Kota Yogyakarta. Djoko lulus dari Sekolah Guru A pada tahun 1959 dan kemudian memutuskan untuk mengajar.

Pengalaman pertama kali mengajar, Djoko menjadi guru sekolah dasar di Widoro, sebuah desa di daerah Wates pada tahun 1959-1962. Sekolah itu terletak di lereng bukit dan dapat ditempuh dengan bersepeda sejauh 10 km dari Kota Wates, ditambah 2 km berjalan kaki sambil menyeberangi sungai. Salah satu hal yang membuatnya bangga akan prestasinya selama mengajar disana adalah Djoko mampu meluluskan 100% muridnya. Tentu saja pencapaian tersebut tidak dapat diraih dengan mudah. Berbagai strategi Djoko lakukan demi murid-muridnya, antara lain dengan menambah jam pelajaran hingga siang agar materi dapat disampaikan secara detail dan mendalam, serta membuat kegiatan pembelajaran dibuat semenarik mungkin.

Setelah 2 tahun mengajar di Widoro, Djoko kemudian pindah ke sekolah dasar di Kulon Progo pada tahun 1962-1964. Pada tahun 1964 Djoko berpindah tugas ke daerah Payak, Piyungan, Bantul, tepat sekitar setahun setelah pernikahannya. Keinginannya untuk berpindah menemui kesulitan. Proposal kepindahan yang diajukan kepada inspektur pendidikan mendapatkan respon yang kurang baik. Padahal, Djoko menjelaskan bahwa alasan dirinya ingin dipindahkan agar dia dapat melanjutkan kuliah dan berharap bisa lebih dekat dengan Kota Yogyakarta demi kepentingannya itu. Tetapi niat baiknya tersebut ditolak oleh inspektur pendidikan, alasannya jika Djoko beralasan sakit berat seperti TBC misalnya, mungkin masih bisa diterima. Kemudian inspektur pendidikan itu juga menantang Djoko untuk memilih antara melanjutkan kuliah atau bekerja. Penolakan itu tidak membuat Djoko menyerah. Dia tetap melanjutkan proposal kepindahannya dan akhirnya dapat pindah mengajar di sekolah dasar di daerah Payak, Piyungan, Bantul. Kejadian itu sangat membekas dalam hati Djoko muda. Dia berujar kelak apabila menjadi “orang besar”, dia tidak akan bersikap seperti itu.

Selain mengajar di sekolah, Djoko juga sekaligus belajar di bangku kuliah. Beliau berkuliah di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada. Saat hendak masuk UGM, Djoko dihadapkan dua pilihan jurusan, yaitu sejarah atau Sastra Indonesia. Djoko memiliki tiga mata pelajaran favorit pada bangku sekolah, yaitu sejarah, Sastra Indonesia, dan ilmu pendidikan. Namun, Djoko memilih sejarah, dia termotivasi karena pada saat bersekolah dahulu, guru sejarahnya mengajar dengan sangat menarik. Pada awalnya, Djoko masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan selama satu tahun, kemudian pindah ke jurusan sejarah.

Saat menjadi guru sekaligus mahasiswa, setiap harinya Djoko harus mengayuh sepedanya kurang lebih 60 km pulang-pergi dari kampus ke sekolah tempatnya mengajar. Jika mendapat jam kuliah pagi, Djoko mengajar pada sore harinya, begitu pula sebaliknya. Hal itu dilakukannya dengan ikhlas, menurutnya jika dijalaninya tanpa beban hal seperti itu akan terasa ringan. Terkadang Djoko juga menyempatkan untuk beristirahat ditengah perjalanan, makan di sebelah irigasi sambil menikmati semilirnya angin menjadi hal yang

lumrah baginya. Saat beristirahat, Djoko juga berusaha memanfaatkan waktunya di tengah sibuknya belajar-mengajar untuk membaca buku.

Banyak rintangan yang dilalui Djoko saat harus bolak-balik untuk kuliah dan mengajar, contohnya adalah ban sepeda yang kempes, panas, hujan, dan rasa haus. Tetapi dia menjalani semua itu dengan ikhlas, rasa lelah akan hilang jika dijalani dengan ikhlas. Tanggung jawab mengajar di sekolah juga merupakan salah satu alasan Djoko untuk tidak secara penuh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kampus.

Pada tahun 1965, Djoko lulus dari UGM dan memperoleh gelar sarjana muda. Setelah lulus dari UGM, dia diangkat sebagai asisten dosen di jurusan sejarah karena nilainya yang sangat baik. Disinilah akhir perjalanan mengajar Djoko menjadi guru sekolah dasar, karena sudah menjadi asisten dosen. Pada awal tahun 1970-an, berdiri Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan (LSPK), yang diprakarsai oleh Prof. Sartono Kartodirdjo, yang merupakan dosen pembimbing tugas akhir Djoko saat masih kuliah dan Djoko diminta untuk membantu dalam penelitian. Di lembaga inilah dia diminta untuk mendalami sejarah pedesaan, sejarah pembangunan, dll.

Kemudian Djoko beserta tiga temannya disarankan untuk meneruskan studinya ke luar negeri.

Pengalaman saat menjadi asisten Prof. Sartono sangat dimanfaatkan oleh Djoko. Banyak hal-hal yang dapat dipelajari oleh Djoko saat mengasisteni Pak Sartono. Contohnya pada saat dia membantu Prof. Sartono dalam penyusunan buku berjilid Sejarah Nasional Indonesia, disinilah Djoko belajar bagaimana menyusun program, visi sejarah, dan bagaimana semua desain itu diterapkan dalam penulisan.

Mengasah Kompetensi Menebar Inspirasi

Awal mula masa pencapaian gemilang Djoko Suryo dimulai pada tahun 1974, Djoko yang saat itu berstatus sebagai asisten dosen mendapat kesempatan emas untuk mengikuti sebuah seminar Internasional yaitu *Internasional Association of Historians of Asia* (IAHA). Dalam seminar IAHA Djoko diminta oleh Prof. Sartono Kartodirdjo untuk mendampingi Anton Lucas dalam pembuatan disertasi. *Paper* yang dibuat oleh Djoko berjudul “*Some Notes on the Tiga Daerah Affair: A Local Event in The Early Indonesian Revolution*”.

Paper tersebut menceritakan tentang Peristiwa Tiga Daerah yang terjadi pada masa revolusi. Peristiwa Tiga Daerah terjadi di daerah utara pesisir Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Pemasang, Tegal, dan Brebes. Peristiwa Tiga Daerah terjadi antara Bulan Oktober hingga Desember 1945. Peristiwa yang berlatar belakang sosio-ekonomis ini muncul akibat adanya rasa kekecewaan dan dendam rakyat yang sudah tertanamkan sejak lama kepada para kolonial. Rasa kekecewaan rakyat

muncul tidak hanya kepada kolonial penjajah saja, tetapi juga kepada para pamong desa yang mempunyai kekuasaan dan bekerja sama dengan pemerintah penjajah Jepang. Pada masa itu kondisi ekonomi rakyat di tiga daerah tersebut sangat buruk. Rakyat merasa dirugikan dengan adanya aturan harus memberikan upeti, juga para pamong yang mengambil hasil panen rakyat secara paksa, serta banyaknya tindak penyiiksaan yang dilakukan oleh para pamong desa. Sebagai akibatnya, rakyat di tiga daerah tersebut serentak melakukan perlawanan terhadap para pejabat dan pamong desa. Sebagai akibatnya banyak pamong desa yang terpaksa diamankan di penjara untuk menghindari amukan rakyat. Hingga akhirnya *paper* tersebut berhasil diterbitkan oleh LIPI dan juga menarik perhatian Prof. John D. Legge, ialah seorang profesor sejarah di Monash University. Karena ketertarikannya dengan *paper* milik Djoko, Prof. John D. Legge merekomendasikan Djoko untuk melanjutkan studi di Monash University, Australia.

Tahun 1978, Djoko memboyong keluarganya ke Australia untuk melanjutkan studi lanjutnya di Monash University untuk meraih gelar S3. Disertasi yang dibuat Djoko berjudul “Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan

Semarang (1830-1900)”. Disertasi yang dibuat oleh Djoko ini merupakan salah satu rintisan pemikirannya yang mengikuti jejak dosennya terdahulu yaitu Prof. Sartono Kartodirdjo mengenai sejarah sosial. Sekitar tahun 1984 Djoko berhasil mendapat gelar Ph.D.

Setelah menyelesaikan studinya di Australia, Djoko dan keluarganya kembali ke Yogyakarta. Di Yogyakarta Djoko terus mengabdikan dirinya di bidang akademik maupun penelitian. Kurang dari satu tahun setelah dia mengabdikan diri di Universitas Gadjah Mada, Djoko berhasil menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1991 Djoko diangkat menjadi Dekan Fakultas Sastra UGM. Djoko menjabat sebagai dekan selama 7 tahun dalam 2 periode, banyak hal terjadi ketika Djoko menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra.



3.1 Demo aksi mahasiswa di bunderan UGM

(Fotografer: Agus Bakti Sedjatiawan)

Mahasiswa Fakultas Sastra pada saat itu banyak yang ikut serta dalam aksi demo merombak birokrasi pemerintahan. Aksi demo yang dilakukan para mahasiswa ini berkaitan dengan jabatan Presiden Soeharto yang represif militeristik. Para mahasiswa menyampaikan pernyataan keprihatinan atas kondisi perekonomian saat itu yang dilanda krisis moneter, penolakan Soeharto sebagai presiden kembali, memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok, dan mendesak untuk dilaksanakannya reformasi. Demonstrasi yang semula berjalan baik dan damai di Bunderan UGM menjadi ricuh saat malam hari

di daerah Gejayan, hingga baku tembak senjata pun terjadi. Hal inilah yang menyebabkan banyak tentara maupun polisi yang mendatangi kantor Djoko yang saat itu menjabat sebagai dekan dan ingin menangkap para mahasiswanya. Namun, Djoko di pihak dekan mencoba melindungi para mahasiswanya karena ini juga merupakan salah satu tanggung jawabnya sebagai seorang dekan.



3.2 Djoko Suryo saat diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Sastra UGM

Berkat kegigihannya dalam mengabdikan diri kepada pendidikan universitas dan sikap penuh tanggung

jawabnya, pada tahun 1999 Djoko dilantik menjadi Guru Besar di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya yang dahulu bernama Fakultas Sastra UGM hingga sekarang. Pada saat upacara pengukuhan Djoko sebagai guru besar yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998, dia menyampaikan pidato yang berjudul “Masyarakat Indonesia dalam Dinamika Sejarah: Kesenambungan dan Perubahan”, yang intisarinya berisi:

“Perjalanan sejarah abad 20 akan segera berakhir dan berganti pada era sejarah baru abad 21. Abad 20 merupakan abad penting penuh makna karena telah terjadi peristiwa-peristiwa besar yang banyak membawa perubahan. Peristiwa bersejarah itu seperti perang, konflik, krisis dunia, proses modernisasi, dan pembangunan. Perang dan konflik telah terjadi sejak Perang Dunia I (1914-1918), ke Perang Dunia II (1939-1945), sampai dengan Perang Dingin. Perang tersebut telah membuat 30 sampai 40 juta orang terbunuh dengan cara yang beragam. Perang Dunia I telah membawa fasismediktatorisme, komunisme, dan

meningkatkan perjuangan kemerdekaan dan demokrasi. Sedangkan Perang Dunia II membawa kolonialisme dan imperialisme Barat yang diikuti dengan kelahiran bangsa baru. Berakhirnya perang Dunia II memunculkan kembali Perang Dingin yang bersifat global. Hal ini terbentuk karena tatanan politik dunia yang bersifat bipolar, berpusat pada Blok Barat dengan demokratis-kapitalis, dan Blok Komunis dibawah Amerika dan Rusia. Akibat hal ini terbentuklah negaranegara Dunia Ketiga dan muncul pula Gerakan Non Blok (GNB). Konfrontasi antara kedua blok ideologi dunia tersebut mempengaruhi kerangka persepsi konfrontasi tatanan dunia secara dikhotomis dan negatif.

Perang Dingin berakhir pada abad 20 dengan ditandai runtuhnya komunisme dan kemenangan kapitalisme. Gelombang perubahan terjadi dalam tatanan politik, ekonomi, masyarakat, dan kebudayaan. Pergeseran tatanan politik yang semula

bipolar menjadi multipolar, yang diikuti pembentukan hubungan ekonomi baru yang bersifat global seperti liberasi perdagangan dan zona kerja sama regional. Pandangan dari ahli oleh Francis Fukuyama tentang “berakhirnya sejarah” dalam karyanya The End of History and the Last Man (1992). Menurut Fukuyama akhir sejarah terjadi akibat tidak berfungsinya lagi ide/pemikiran manusia serta organisasi sosial sehingga dinamika perubahan, pencerahan, kemajuan, dan reformasi sudah tidak terjadi lagi.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ahli lain yaitu Ohamae bahwa proses tata ekonomi global yang baru serta sistem liberalisasi telah membawa peran negara menjadi lemah karena tidak mampu menguasai lalu lintas arus modal. Pendapat lain yang bertentangan disampaikan oleh Samuel P. Huntington dengan menulis karyanya yang berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of World

Order. Karya ini berpendapat tentang pertentangan peradaban Barat dan Islam yang ditentang oleh banyak orang.

Dilihat dari 3 pendapat yang ada, semuanya memuat perspektif sejarah pesimis dan Eropasentris di dalam melihat dinamika sejarah global mutakhir. Pandangan berakhirnya sejarah bukan hal baru, sebelumnya Jean Baudrillard juga mengemukakan konsep bahwa pemilik kebudayaan tertinggi di dunia mengalami keruntuhan setelah mencapai masa puncaknya.

Berbeda dengan pandangan masa depan suram, Condorcet melihat masa depan dengan pandangan yang cerah. Menurutnya masa datang menuju ke arah kemajuan, perdamaian, keserasian, dan kebahagiaan. Hal ini berdasar bahwa perjalanan sejarah umat manusia digerakkan oleh evolusi pikiran manusia kolektif yang melalui tiga era yaitu: era Teologis, ke era Metafisik, dan era Positif.

Pandangan filsafat spekulatif yaitu Rostow melahirkan pandangan baru tentang sejarah kritis atau analitik. Bahwa masyarakat tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan ekonomi tradisional ke transisional menuju tinggal landas, masyarakat matang, tahap konsumsi massal, dan tahap lewat konsumsi massal.

Abad 20 bagi masyarakat Indonesia juga abad yang penting, karena penuh dengan peristiwa monumental dan perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Peristiwa yang menonjol disini ditandai dengan kelahiran organisasi pergerakan modern hingga terjadilah Sumpah Pemuda. Peristiwa historis juga terjadi pada pertengahan kedua abad ke 20 yang menjadi tonggak sejarah sekaligus menjadi symbol proses transformasi ke masyarakat tradisional ke masyarakat kolonial menuju ke masyarakat Indonesia modern yaitu masyarakat bangsa.

Proses terbentuknya Bangsa Indonesia merupakan perwujudan perjuangan yang panjang dan merupakan hasil proses sejarah yang dinamis dan integratif. Burung Garuda dan Motto “Bhineka Tunggal Ika” dipilih sebagai lambang Negara kuat bangsa Indonesia untuk mencapai kesatuan. Konsep kesatuan dan keragaman yang pada hakekatnya telah mengakar dan menjadi gagasan atau ide dalam masyarakat nusantara. Selain itu juga dapat ditafsirkan sebagai rumusan harapan (hope) dan “daya tarik” (pull) perjuangan untuk mewujudkan gagasan kesatuan masyarakat pada masa datang (future) atas “dorongan” (push) realitas kemajemukan masyarakat pada masa lampau.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, interaksi dinamis antara faktor “ke-bhinekaan” dan “ketunggalan” bergerak secara linier dan berkesinambungan menuju arah proses integrasi. Yang secara dinamis juga diikuti dengan proses

ketegangan, konflik, perang, revolusi, dan disintegrasi serta krisis.

Secara historis, proses pertumbuhan pusat-pusat dinamika sejarah di Nusantara telah membawa akibat terjadinya proses integrasi spasial dan kultural. Proses interaksi perdagangan dan pelayaran di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke 15-16 juga menimbulkan proses integrasi spasial dan perekonomian masyarakat nusantara. J.C. Van Leur menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa itu telah terintegrasi dalam perdagangan dan pelayaran internasional di Asia Tenggara, yang menggabungkan Asia Barat, Eropa , dan Asia Timur. Hal itu menjelaskan awal terjadinya proses internasional dan globalisasi masyarakat Nusantara pada masa itu, yang pada masa selanjutnya memberikan pengalaman budaya. Kekuatan arus besar tradisi keagamaan (Hindu-Budha dan Islam) ikut menjadi jembatan dan perekat integrasi spasial, sosial maupun

kultural. Kekuatan-kekuatan eksogen yang datang dari kekuasaan politik kolonial telah menimbulkan kontra-aksi yang mendorong proses integrasi.

Secara prosesusual dinamika menuju integrasi, juga dapat dilihat dari proses munculnya negara-negara tradisional, negara kolonial, hingga negara Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan Indonesia tidak lepas dari pergulatan dan pergumulan kekuatan-kekuatan integratif dan disintegratif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman. Akan tetapi kekuatan integratif sering menjadi penentu terakhir. Penetrasi sistem politik, ekonomi, dan kultural yang dilancarkan oleh pemerintahan Belanda sejak abad ke 19 membawa dampak dalam proses disintegrasi dan diskontinuitas masyarakat tanah jajahan. Penetrasi politik kolonial mengakibatkan ketegangan dan konflik antara penguasa lokal yang tergeser dan penguasa barat. Penetrasi ekonomi kapitalistik Barat

membawa kemerosotan perekonomian dan ikatan kemasyarakatan pedesaan yang menurut Sartono Kartodirdjo mengakibatkan terjadinya gelombang protes dan pergolakan petani di Jawa pada abad ke 19.

Pengenalan sistem edukasi oleh pemerintah kolonial membawa perubahan sosial masyarakat tanah jajahan dengan munculnya golongan yang berperan dalam modernisasi dan mendukung kelahiran nasionalisme di Indonesia, yang oleh Van Niel disebut golongan elite modern dan golongan elite birokrasi kolonial atau priyayi, serta golongan tenaga profesional. Kelahiran nasionalisme di Indonesia merupakan anti-tesa dari kolonialisme, karena mengancam keberadaan kolonialisme.

Pertumbuhan nasionalisme di Indonesia sebelum kemerdekaan menggambarkan proses dialog dan pergumulan antara kekuatan lokal dan supra lokal, nasional dan internasional, sekuler dan keagamaan. Kristalisasi ideologi nasionalisme pada masa

pra-kemerdekaan berkembang pada pasca kemerdekaan dalam bentuk tiga aliran politik , yaitu nasionalisme, sosialisme, dan agama (Islam). Pergumulan dan pergulatan yang sama juga muncul pada masa revolusi, masa pasca revolusi, masa orde-baru, dan masa reformasi yang menggambarkan adanya kesinambungan dinamika sejarah.

Perjalanan bangsa Indonesia selama 53 tahun tidak selalu mulus, karena harus melewati fase kritis, penuh konflik, tantangan disintegratif dan situasi krisis. Fase-fase krisis tersebut diantaranya adalah fase revolusi kemerdekaan (1945-1949), fase pasca revolusi kemerdekaan (1950-1957), fase orde baru (1966-1990an) dan fase mutakhir (1997/1998). Pada fase revolusi, bangsa Indonesia harus menghadapi persoalan ketegangan. Konflik, dan perbedaan sikap antara golongan pro dan kontra revolusi, pro dan kontra republik, perjuangan senjata dan diplomasi, revolusi sosial dan yang menentanginya, generasi

muda dan generasi tua, aliran kiri dan kanan, kekuatan Islam dan sekuler. Fase pasca revolusi kemerdekaan juga disebut sebagai fase percobaan penerapan sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau kostitusional yang berakhir pada kegagalan. Kegagalan pada fase pasca revolusi kemerdekaan mendorong bangsa masuk ke fase demokrasi terpimpin (1957-1965) yang ditandai dengan kehidupan berbangsa terancam oleh situasi konflik, keos, anarkhis, destruktif, dan disintegratif. Masalah penting pada periode ini adalah perjuangan untuk menentukan ideologi Negara dan rasa persatuan nasional. Serta masalah peran militer dalam kepemimpinan Negara. Memasuki fase orde baru pada 1966-1998, pemerintahan dibawah Soeharto lebih berorientasi ke dalam, dan lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan orde Indonesia baru, bukan orde dunia baru. Pemerintahan cenderung konservatif dan bukan revolusioner. Banyak keberhasilan yang terjadi selama

masa orde baru, namun hal itu berakhir setelah diterpa krisis moneter.

Dampak yang ditimbulkan oleh proses modernisasi dan pembangunan selama tiga dekade terakhir terhadap Indonesia memang cukup besar. Secara spasial masyarakat Indonesia telah terintegrasi dalam kesatuan “masyarakat nasional” (national society). Akibatnya, setiap peristiwa yang terjadi pada satu tempat akan segera diketahui oleh masyarakat dilain tempat. Bangsa Indonesia kini tidak lagi sekedar sebagai “komunitas imajiner”, akan tetapi menjadi sebuah komunitas yang aktual, yang membuat setiap warga dalam komunitas dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara intensif. Masyarakat Indonesia kini telah menjadi masyarakat yang terbuka, kritis dan berwawasan luas, sehingga menuntut adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi arus perubahan masyarakat terbuka tidak diikuti oleh proses

keterbukaan, transparansi, dan demokratisasi dalam kehidupan politik, sehingga menimbulkan benturan, ketegangan, dan konflik berkepanjangan.

Untuk menghadapi persoalan masyarakat dan bangsa masa kini yang sedang menghadapi krisis ekonomi dan politik yang berat, maka diperlukan pemahaman dan kesadaran akan dinamika sejarah masyarakat Indonesia dari masa ke masa untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Untuk melakukan reformasi baik dalam bidang politik maupun moral, perlu belajar dari pengalaman sejarah. Para sejarawan memiliki peran penting sebagai penerjemah dan penafsir gagasan kemajuan dan kehidupan bangsa sesuai dengan tuntutan perubahan. Untuk melandasi usaha-usaha mengatasi krisis dan perbaikan bagi sejarah masa depan bangsa, maka perlu kembali keajaran agama dan moral yang tinggi.”

Djoko selalu menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengabdian kepada Universitas Gadjah Mada. Setelah diangkat menjadi dekan, Djoko semakin bertambah semangat dalam melakukan pengabdian kepada universitas khususnya pada fakultasnya yaitu Fakultas Sastra. Salah satu pengabdian adalah dengan membuka program studi diploma tiga. Djoko merasa bahwa lulusan diploma dinilai lebih siap kerja dan dapat terjun langsung ke lapangan. Alasan lainnya ialah sistem belajar di program diploma lebih ke arah praktis, pragmatis, siap menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan akademis dan juga memiliki keterampilan *skill* di setiap bidangnya. Perbedaan pendapat pastilah ada, banyak yang kontra dengan gagasan Djoko untuk membuka program D3, tetapi tidak sedikit pula yang setuju dan mendukung gagasan tersebut. Setelah melalui berbagai perdebatan panjang akhirnya Djoko memenangkan perselisihan itu, program D3 tetap dibuka.

Pengabdian Djoko tidak hanya diberikan kepada fakultasnya, namun juga kepada mahasiswanya. Djoko tidak pernah membuat dinding pemisah antara dia dengan para mahasiswanya. Djoko selalu terbuka kepada

mahasiswanya, kapanpun mahasiswanya membutuhkan bantuan Djoko akan selalu terbuka untuk membantu. Hal itu Djoko lakukan agar menjadi contoh bagi dosen-dosen lain, Djoko berharap agar dosen tidak mempersulit mahasiswa-mahasiswanya dalam proses pembelajaran.

Selain menjadi guru besar di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, saat ini Djoko juga mengajar dan membimbing tesis dan disertasi dari mahasiswa pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keterlibatannya dalam pembimbingan mahasiswa di UIN banyak mempengaruhi minatnya untuk mengembangkan studi tentang Islam dan masalah-masalah kebudayaan di Indonesia. Menurut Djoko, tema ini kurang diperhatikan oleh sejarawan Indonesia, terutama setelah meninggalnya Prof. Dr. Kuntowijoyo. Oleh karena itu kontribusi pemikiran Djoko Suryo sedikit bisa mengisi menurunnya minat itu.

Dalam pembahasannya tentang paradigma budaya profetik dan masyarakat tamadun tampak bahwa dia berupaya merespon pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo yang mulai meredup dalam wacana ilmu sosial dan humaniora. Pengabdian Djoko dalam dunia pendidikan tidak hanya terpaut di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dan Universitas Gadjah Mada saja, Djoko juga mengabdikan dirinya sebagai pengajar di S2 Universitas Negeri Surakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta hingga saat ini.

Selain mengajar di Indonesia Djoko juga pernah mengajar di luar negeri. Dia mendapat kesempatan mengajar sebagai *Visiting Professor* di Jurusan Sejarah, Thammasat University, Bangkok, Thailand dan Hankuk University of Foreign Studies di Korea sekitar tahun 1998-1999. Pada saat Djoko mengajar di Hankuk University of Foreign Studies dia juga bermaksud untuk membangun kerja sama bilateral dalam membuka Program Studi Korea di UGM. Karena hal tersebut, Djoko Suryo menempati posisi sebagai Direktur Pusat Studi Korea UGM sejak tahun 1998.

Tidak hanya aktif di dunia pendidikan dan pengajaran, Djoko juga aktif dalam bidang penelitian baik penelitian yang dilakukannya secara individu maupun penelitian secara kolektif. Pokok bahasan yang selalu menarik perhatiannya ialah bidang Sejarah, Sosial dan di pusat studi kawasan pedesaan. Di setiap penelitian-penelitiannya tersebut Djoko berada dibawah pimpinan Prof. Sartono. Kecintaannya dalam dunia penelitian

membuka peluang Djoko dalam membuat berbagai karya. Djoko pernah melakukan penelitian bekerja sama dengan International Toyota Japan Foundation. Dalam penelitian tersebut, dia bekerja sama dengan teman-temannya yang berasal dari Belanda dan Australia. Djoko diangkat menjadi konsultan untuk pemberian dana dan penelitian sosial ekonomi di Indonesia. Karena hal tersebut, Djoko dapat melahirkan buku tentang perubahan ekonomi dan sosial di daerah pesisir utara daerah Comal. Melibatkan penelitian bersama dengan sarjana Jepang, Belanda, dan Indonesia itu merupakan salah satu karya yang Djoko senangi.

Keterlibatan Djoko di level nasional adalah dia aktif menjadi tim penyusunan kurikulum pendidikan di Depdiknas, untuk pendidikan dasar hingga SMA sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Dia bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum pendidikan 1994 untuk mata pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA. Dalam penyempurnaan kurikulum 2004 terkait bidang sejarah pula, dia diminta dan ditunjuk kembali agar terlibat oleh Depdiknas. Djoko juga aktif dalam kepenulisan buku teks sejarah. Dia menjadi tim penilai buku teks dan pengembang buku buku teks sejarah. Tahun 70-an Djoko

bergabung dalam anggota tim penulisan buku teks sejarah nasional indonesia 6 jilid dibawah pimpinan Prof. Sartono yang diterbitkan tahun 1975. Buku teks SMP dan SMA sejarah juga salah satu karya yang Djoko ikut dalam pembuatan buku tersebut.

Sejak tahun 2003, Djoko Suryo dipercaya sebagai Ketua Bidang Humaniora Pascasarjana UGM. Dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan studi mahasiswa S2-S3 dalam berbagai program yang tercakup dalam bidang humaniora: Sejarah, Antropologi, Arkeologi, Linguistik, Sastra, Filsafat, Seni Pertunjukan, dan American Studies. Di tingkat rektorat dia terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanah (MWA) pada saat status kelembagaan UGM ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Periode transisi ini memberi tantangan yang cukup berat bagaimana di satu sisi mempertahankan visi sebagai universitas nasional yang berorientasi kerakyatan dan di sisi lain UGM tumbuh sebagai universitas yang mandiri. Salah satu kontribusi Djoko Suryo dalam kelembagaan ini adalah menjadi ketua panitia seminar pelurusan reformasi.

Untuk perguruan tinggi, dia menjadi anggota konsorsium bidang sastra dan filsafat sejak tahun 1988.

Kelembagaan ini, yang kemudian namanya berubah menjadi Dewan Disiplin Ilmu, menangani masalah kurikulum di perguruan tinggi khususnya bidang filsafat dan sejarah. Sejak 2003, Djoko duduk sebagai editor sekaligus penulis untuk melakukan penyusunan (kembali) Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Disamping itu Djoko juga melakukan penelitian, penulisan buku-buku sosbud di DIY yang diterbitkan oleh kraton. Djoko ditunjuk untuk menjadi tim penyusun dan editor yang kemudian buku tersebut dapat berhasil diterbitkan tahun 2005 dengan judul *Kraton Jogja: History and Cultural Heritage*. Buku ini berisi tentang sejarah Kraton Jogja dari berbagai sudut pandang yang meliputi wilayah, silsilah, dan adat istiadatnya.

Selain Buku *Kraton Jogja: History and Cultural Heritage*, Djoko sudah menghasilkan berbagai karya mengenai sosial budaya di Indonesia. Salah satu bukunya ialah yang berjudul *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*. Buku ini berisikan tulisan-tulisan Djoko dan sumbangan karya dari teman-temannya sebagai hadiah peringatan usia ke 70 tahunnya. Buku ini terbagi menjadi empat sub tema; Sejarah Sosial dan Historiografi Indonesia Modern; Kota,

Identitas, dan Transformasi Sosial Budaya serta masalah perkotaan; Islam, Moral, dan masalah-masalah Kebudayaan yang terdapat di Indonesia; dan *Kingship* yang sedang menjadi perhatian masyarakat Yogyakarta pada saat itu.

Dalam lingkungan Pusat Antar Universitas Djoko juga aktif di bidang sosial menjadi kepala studi pedesaan dan menulis tentang agama dan perubahan-perubahan di Indonesia. Sebagian besar penelitiannya dalam bidang sosial budaya. Penelitiannya yang terakhir tentang penulisan sejarah perundangan pertanahan di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan DIY tahun 2012. Tahun 2013 di Diknas penulisan 9 jilid buku teks Sejarah Nasional Indonesia: Indonesia Dalam Arus Sejarah, Djoko ikut dalam penulis dan editor dalam jilid 4.

Sejarawan Dalam Pusaran Keistimewaan

1. Djoko Suryo dan Keistimewaan Yogyakarta



4.1. Garis Imajiner Yogyakarta (Foto: jogjasiana.net)

Yogyakarta adalah jejak kebesaran Mataram Islam. Sebagai kota lama, Yogyakarta memiliki sejarah yang teramat panjang sampai kedatangan Bangsa Barat (Belanda) di Jawa. Sebagai penerapan politik *divide at*

impera, Mataram dipecah menjadi 2, yakni Yogyakarta dan Surakarta berdasarkan Perjanjian Giyanti pada tanggal 17 Februari 1755. Belum puas dengan memecah Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta, Belanda menggelar Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang menandai berdirinya Kadipaten Mangkunegaran dan Pakualaman. Kebesaran Mataram pun menyisakan 4 kerajaan tersebut.

Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur dalam kontra politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*.

Kontra politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577. Pada masa penjajahan Belanda, setiap Sultan yang akan naik tahta harus menandatangani

sebuah perjanjian dengan pemerintah yang disebut Kontra Politik. Belanda juga berusaha mengendalikan dan memperkeruh keadaan Kraton melalui Papatih Dalem atau *Rijksbestuurder* dalam bahasa Belanda.

Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta pada Masa Penjajahan Belanda, raja-raja yang memerintah di Kasultanan Yogyakarta harus terikat dengan suatu kontrak politik dengan pemerintah Belanda. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengendalikan Kasultanan agar tidak melakukan perlawanan yang dapat mengancam posisi dan kedudukan Belanda. Sultan yang menduduki tahta sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta tetap memegang pemerintahan atas daerahnya, akan tetapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah Papatih Dalem (*Rijksbestuurder*). Jabatan Papatih Dalem tersebut diangkat dan diberhentikan Gubernur Jenderal dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan Sultan. Papatih Dalem juga bertanggungjawab kepada Gubernur maupun kepada Sultan, dan oleh karenanya mendapat gaji dari Belanda dan Kasultanan.

Susunan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta pada awalnya terdiri dari dua *Nayaka/Kanayakan* (semacam kementerian), yaitu

Nayaka urusan dalam dan *Nayaka* urusan luar, yang diketuai oleh Papatih Dalem. *Nayaka* urusan dalam terdiri dari: *Kanayakan Keparak Kiwo* dan *Kanayakan Keparak Tengen*, yang bertugas mengurus masalah yayasan dan pekerjaan umum serta *Kanayakan Gedong Kiwa* dan *Kanayakan Gedong Tengen* yang bertugas mengurus masalah keuangan. *Kanayakan* urusan dalam bertanggungjawab menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah Yogyakarta dan Kraton. *Kanayakan* urusan luar bertanggungjawab menjalankan pemerintahan di luar Kota Yogyakarta.

Hingga pada akhir dalam masa pemerintahan Belanda, dan sistem pemerintahan Yogyakarta urusan nagara di jaga lewat Papatih Dalem sebagai kepanjangan tangan dari Belanda. Sistem pemerintahan Kraton terbagi kedalam sembilan belas bagian. *Parentah Hageng Kraton* bertugas mengadakan koordinasi dan menghubungkan bagian-bagian dalam Kraton. Bagian *Kanayakan* yang dibawah oleh Papatih Dalem bertugas mengadakan koordinasi dalam pemerintahan Nagara. Bagian yang bertugas sebagai penghubung disebut dengan antara pemerintahan Kraton dengan Nagara adalah *Kawedanan Kori*. Sultan kehilangan kekuasaan pada daerah luar

Kraton sehingga wilayah tersebut berada dalam kendali Belanda lewat bagian *Kanayakan* tersebut.

Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan pada tanggal 5 Maret 1945 Yogyakarta berhasil diduduki. Lalu pada tanggal 8 Maret 1945, Bandung berhasil diduduki dan pasukan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang juga dijuluki *Dai Nippon* di Subang, Jawa Barat. Dengan demikian wilayah Hindia Belanda berhasil diambil alih Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan Indonesia. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Wilayah 1 meliputi Pulau Jawa dan Madura, wilayah 2 meliputi daerah Pulau Sumatera dan Wilayah 3 meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor dan Maluku. Pembagian menjadi 3 wilayah ini bukan hanya sebagai pemindahan tangan pada penjajahan yang ada di Indonesia, alasan Jepang melakukan dengan membagi wilayah yang menjadi 3 yaitu agar mempermudah sistem pemerintahan Jepang dalam mengatur daerah kekuasaannya, sistem ini disebut dengan Desentralisasi.

Pulau Jawa dan Madura kecuali kedua koci Surakarta dan Yogyakarta dibagi atas *Syu, Syi, Ken, Gun, Son,* dan *Ku*. Daerah *Syi* sama dengan daerah *Standes gempente* dahulu (istilah kotapraja). Daerah *Syu* sama dengan keresidenan dahulu yang terbagi atas *Syi* dan *Ken*. Daerah *Ken* sama dengan Kabupaten *Gu* sama dengan *Kewedanaan* atau distrik daerah *Son*, *Son* sama dengan kecamatan atau onder distrik. Sedangkan *Ku* sama dengan kelurahan atau desa dahulu.

Sri Sultan HB IX kembali dilantik menjadi Sultan oleh *Dai Nippon Gun Sireikan* (Panglima Besar Bala Tentara Dai Nippon) menjadi Sultan Yogyakarta dengan nama *Ko* pada tanggal 1 Agustus 1942. *Ko* bertugas menjalankan pemerintahan Kasultanan (Koti) menurut *Dai Nippon Gun Sereikan*.

Sultan kemudian melakukan reorganisasi *Pangreh Praja* pada bulan April tahun 1945. *Kawedanan* (distrik) dihapuskan dan setiap Kabupaten langsung dibagi menjadi beberapa *Asistenan* yang dipimpin oleh *Panewu Pangreh Praja*. *Kawedanan* dan *Asistenan* yang berada di Kabupaten Kota Yogyakarta dihapus. Kabupaten kota dibagi menjadi beberapa *Kemantren* yang dipimpin oleh *Mantri Pangreh Praja*. Setiap *Kemantren* dibagi menjadi

beberapa Rukun Kampung (*Aza Shokai*), dan setiap Rukun Kampung terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (*Tonari Kumi*).

Pada masa pemerintahan Jepang tahun 1942-1945 dibangun sebuah proyek irigasi yang dikenal dengan *Kanal Yoshiro* atau Selokan Mataram di Yogyakarta. Pembangunan Selokan Mataram ini atas kesepakatan Pemerintah Jepang dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan mempekerjakan sebagian besar warga Yogyakarta sebagai pekerjanya. Pada saat itu pemerintah Jepang sedang menggalakan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang melawan sekutu dengan mempekerjakan warga pribumi secara paksa atau disebut *Romusha*. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX berinisiatif untuk mempekerjakan warga Yogyakarta sehingga mereka tidak dikirim ke luar Pulau Jawa sebagai tenaga *Romusha*.

Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian memanggil Paku Alam VIII dan KRT. Honggowongso yang merupakan staf senior Kepatihan. Dalam pertemuan tersebut, Paku Alam memberikan saran bahwa sebaiknya Yogyakarta memberikan dukungan penuh terhadap proklamasi

kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan di Jakarta. Pendapat Paku Alam tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan atau cita-cita rakyat Yogyakarta yang sudah lama diidam-idamkan untuk merdekanya Indonesia.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan KRT. Honggowongso untuk mempersiapkan sebuah telegram yang nantinya akan dikirimkan kepada Ir. Soekarno, Moh. Hatta serta Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Selang satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX mengirim telegram tersebut. Isi dari telegram tersebut berisi ucapan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan, di seluruh Indonesia dibentuk sebuah badan bernama Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah atau disingkat dengan KNID. Tugasnya yaitu membantu pemerintah setempat dalam menjalankan pemerintahan. Di Yogyakarta, KNI dibentuk untuk satu wilayah Yogyakarta secara keseluruhan. Melihat aspirasi dari rakyat Yogyakarta dan dengan persetujuan dari komite tersebut, Sri Sultan HB

IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945. Isi dari amanat tersebut menegaskan bahwa Kasultanan dan Paku Alaman masing-masing merupakan daerah istimewa dalam RI yang artinya masih terpisah dan belum merupakan satu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal 6 September 1945, pemerintah pusat menyampaikan Piagam Penetapan Kedudukan Yogyakarta dalam Negara RI. Piagam penetapan tersebut dikeluarkan masing-masing untuk Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Isi dari piagam tersebut yaitu mengakui kedudukan Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin dalam daerahnya masing-masing.

Keluarnya amanat 5 September 1945, kemudian disusul dengan amanat 30 Oktober 1945. Amanat 30 Oktober 1945 memperjelas sekaligus menunjukkan kepada rakyat serta pemerintah pusat bahwa Yogyakarta yang terdiri dari Kasultanan dan Paku Alaman akan senantiasa bekerjasama mendukung pemerintahan RI. Hal yang menarik dari Amanat 30 Oktober adalah di Yogyakarta hanya terdapat satu Daerah Istimewa. Daerah Istimewa yang dimaksud belum bernama Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi masih bernama Daerah Istimewa

Republik Indonesia. Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII masing-masing berkedudukan sebagai Kepala Daerah Istimewa tersebut, sehingga tidak ada yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-Bhineka Tunggal Ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan Pemerintah Provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan

yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.



4.2 Peran Sultan HB IX dalam berdirinya UGM

(Foto: Humas UGM)

Djoko mengungkapkan bahwa keistimewaan Yogyakarta tak lepas dari kemurahan hati sultan. Tidak

ada daerah lain yang rela tanahnya dihibahkan untuk rakyatnya. Bukan hanya sekedar 1 hektar maupun 2 hektar, bahkan puluhan hektar. Universitas Gadjah Mada adalah salah satu bentuk kemurahan hati Sultan. Tanah yang didirikan gedung-gedung adalah milik Sultan. Pada awalnya kegiatan perkuliahan diadakan lingkungan Keraton Ngayogyakarta, yaitu di Sitihinggil dan Pagelaran Keraton serta gedung-gedung lain di sekitar Keraton atas peran dari Sri Sultan HB IX. Kemudian, UGM berdiri pertama kali dengan nama Balai Perguruan Tinggi UGM pada tanggal 3 Maret 1946. Pada masa itu, Sri Sultan HB IX dan Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Kurator. Selain itu, Sultan HB IX juga dengan tegas menetapkan bahwa masyarakat Tionghoa dilarang untuk memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta.

Sembilan tahun adalah waktu yang tidak sebentar. Para petinggi Kraton mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyusun Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Djoko, adalah salah satu yang terlibat dalam penyusunan itu, dia juga diangkat sebagai abdi dalem dan diberi gelar Kanjeng Raden Tumenggung Suryohadibroto atau lebih singkatnya KRT.

Suryohadibroto. Pengetahuannya dalam bidang sejarah memberikan nilai lebih dalam merumuskan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Bersama tim asistensi, Djoko berusaha membuat undang-undang yang cocok dengan jiwa Yogyakarta serta tidak menghilangkan keistimewaan yang ada di dalamnya.

Tak mudah untuk membuat kebijakan yang akan dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut, itu dibuktikan dengan lamanya waktu penyusunan yang memakan waktu hingga 9 tahun. Banyak ide-ide yang ditampung dan dipertimbangkan. Salah satu tugas Djoko adalah mengkaji ide-ide yang masuk dan menghimpunnya menjadi satu sehingga terciptalah Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang sempurna. Penyusunan UUK (Undang-Undang Keistimewaan) Yogyakarta menjadi perjalanan yang panjang bagi Djoko. Banyak yang dikorbankan mulai dari waktu hingga tenaga. Namun perjuangannya itu tidak sia-sia, setelah UUK di resmikan, banyak yang berubah dengan Yogyakarta. Yogyakarta mendapat dana istimewa yang jumlahnya cukup besar, dana itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Yogyakarta khususnya untuk memberantas kemiskinan.

2. Pro Kontra Keistimewaan

UU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

Momentum Penting Bangkitkan Kepenyairan

DENGAN disahkannya UU Keistimewaan Yogyakarta, 30 Agustus 2012 membuka peluang bagi masyarakat mengembangkan hajat hidupnya. Bagi intelektual, budayawan, seniman, penyair dan elemen yang lainnya UU Keistimewaan menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali oase krida tentang Yogyakarta untuk Indonesia masa depan yang lebih baik.

"Dari aspek kesejarahan keistimewaan yuridis legal formal mendasari terbentuknya Yogyakarta istimewa dengan dikukuhkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) ini menjadi UU Keistimewaan yang diperjuangkan selama sembilan tahun," ujar sejarawan UGM Prof Dr Djoko Suryo, Jumat (31/8) dalam diskusi antologi 'Satu Kata: Istimewa'.

Diskusi mengangkat tema 'Meneguhkan Kembali Peran Yogyakarta sebagai Ibu Kota Penyair', di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) UGM Bulaksumur yang dibuka Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM Dr Ida



Djoko Suryo, Faruk HT dan KRT Jatiningrat.

Rochani Adi SU dan Ketua Panitia Ray Sitoroesmi Prabuningrat. Diskusi juga mengundang narasumber KRT Jatiningrat dan Prof Dr Faruk HT dipandu Dr Aprinus Salam MHum.

Diskusi antologi ini untuk menghidupkan kembali semangat kepenyairan di Yogyakarta melalui fasilitas yang disediakan PKKH UGM yang dulu sangat populer dengan Purma Budaya.

Diskusi dihadiri banyak penyair, budayawan dan ele-

men yang lain, di antaranya penyair Iman Budi Santoso yang mengkritisi satu kata 'Yogyakarta' yang penuh makna menjadi 'Jogja' yang tidak ada artinya apa-apa.

Sementara itu KRT Jatiningrat atau populer dengan sebutan Rama Tirun lebih banyak mengungkap filosofinya Yogyakarta yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. Mangkubumi telah mele-

takkan dasar yang kuat pe- waris tahta Mataram di antara- nya filosofi Yogyakarta 'mema- yu hayuning bawana'.

Filosofi ini mengandung makna sebagai kepanjangan tangan Allah, yaitu menjaga dan menghidupkan kembali dunia dari kerusakan.

Filosofi ini tetap Jawa, tetapi mempunyai pengertian universal. Filosofi persatuan dan kesatuan disimbolkan dalam 'golong gilig', sehingga dalam UUK dengan penetapan

Sultan sebagai Gubernur tidak boleh masuk partai untuk menjaga hubungan seluruh elemen," kata KRT Jatiningrat.

Guru besar FIB UGM Prof Dr Faruk HT menegaskan, yang perlu disadari di dunia ini tidak ada yang tidak istimewa, kalau tidak istimewa pasti akan hilang. Masyarakat kebudayaan membutuhkan kebanggaan, artinya istimewa tidak ada kalau tidak ada yang istimewa, terutama untuk Yogyakarta sejak dulu memang istimewa, karena itu dengan pengakuan yuridis legal formal Yogyakarta menjadi berbeda.

"Yogyakarta istimewa bukan karena diistimewakan, tetapi 'gawan bayi'. Diistimewakan atau tidak, diminta atau tidak, Yogyakarta akan tetap istimewa dan masih banyak variabel keistimewaan daripada sekadar urusan birokrasi. Saya akan lebih 'ngeman' ke-yogya-an saya daripada menuntut keistimewaan yang justru membuat saya kehilangan keistimewaan saya," kata Prof Faruk HT. (Asp) - k

4.3 Kebangkitan Yogyakarta melalui Undang-Undang Keistimewaan (Foto: Humas UGM)

Yogyakarta adalah daerah yang istimewa dalam berbagai aspek dari mulai budaya hingga sistem pemerintahannya. Siapa yang tak mengenal bahwa Yogyakarta sebagai daerah istimewa? Kata istimewa nampaknya sudah melekat dan memiliki kaitan erat dengan Yogyakarta. Jauh sebelum kemerdekaan, Yogyakarta dulunya adalah daerah swapraja atau daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri, dulunya

Yogyakarta disebut sebagai Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Barulah setelah proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Setelah masuknya Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia, perjalanan menuju daerah istimewa dimulai, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pembentukan DIY diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada akhirnya Yogyakarta resmi menjadi Daerah Istimewa pada tahun 1959.

Saat ini, keistimewaan Yogyakarta telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 2012. Perumusan UU Keistimewaan Yogyakarta membutuhkan waktu yang tidak sebentar, perumusan ini membutuhkan waktu tidak

kurang dari 9 tahun, cukup lama dan menguras pikiran. Yang diatur dalam UU Keistimewaan Yogyakarta di antaranya adalah ketentuan umum, batas dan pembagian wilayah, asas dan tujuan, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintahan, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, tata cara pengajuan calon, gubernur dan/atau wakil gubernur berhalangan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, perda, perdais, peraturan gubernur dan keputusan gubernur, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan yang terakhir adalah ketentuan penutup. Semua disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan Yogyakarta tanpa mengubah hal-hal yang telah melekat seperti kebudayaannya.

Menengok lebih ke belakang, nampaknya jalan keistimewaan Yogyakarta tak semulus yang kita kira, banyak pertentangan dan ketidaksetujuan atas keistimewaan Yogyakarta. Menurut Djoko, ada pihak yang tidak menginginkan pemilihan gubernur berdasarkan garis keturunan. Pihak yang kontra dengan keistimewaan menginginkan pemilihan gubernur melalui proses pemilihan kepala daerah atau pilkada seperti daerah yang lain di Indonesia. Namun secara historis,

pemilihan gubernur di Yogyakarta memang sudah berdasarkan garis keturunan, karena sultan dianggap memiliki wibawa dan karisma tersendiri dalam memimpin Yogyakarta. Ditilik dari segi historis, Djoko mengatakan bahwa Yogyakarta telah berperan dalam kemerdekaan sebagai suatu wilayah pusat republik yang artinya Yogyakarta berperan dalam aksi pembelaan negara dalam masa penjajahan, selain itu pada masa penjajahan semangat nasionalisme sultan sangatlah tinggi dan ikut serta membela negara dibuktikan dengan ketersediaannya untuk menjadikan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Indonesia saat masa darurat.

Rakyat yang pro dengan keistimewaan menginginkan semangat nasionalisme itu tetap berkobar di Yogyakarta dengan cara mengangkat sultan sebagai gubernur. Jika gubernur dipilih melalui proses pilkada maka akan banyak partai yang ikut serta sehingga kepentingan individu dan kelompok akan menonjol dan mempengaruhi kesejahteraan Yogyakarta. Selain itu, jika diadakan pilkada maka akan ada masalah *money politic*. Namun nampaknya masyarakat Yogyakarta banyak yang menginginkan Yogyakarta menjadi daerah istimewa terbukti dengan telah ditetapkannya Undang-undang

keistimewaan Yogyakarta. Ada beberapa aspek yang berubah setelah penetapan Undang-undang keistimewaan. Setelah ditetapkannya UUK, Yogyakarta mendapat anggaran dana keistimewaan. Menurut sumber, Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk kecamatan-kecamatan yang mayoritas warganya berstatus miskin. Namun pada kenyataannya, walaupun ada dana istimewa yang digunakan untuk membantu kecamatan-kecamatan yang notabene masyarakatnya miskin, pemerataan dana tersebut belum teralokasi secara merata, masih banyak desa-desa yang belum merasakan dana bantuan tersebut. Berikut adalah tabel data kemiskinan yang dikutip dari data BPS

Kabupaten/Kota	2009		2010		2011		2012		2013
	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin (000)	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin (000)	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin (000)	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin (000)	
D.I. Yogyakarta	220830	574.92	234282	540.4	257909	564.3	270110	562.1	303843
Kulonprogo	205585	89.91	225059	90	240301	92.8	256575	92.4	259945
Bantul	224373	158.52	245626	146.9	264546	159.4	284923	158.8	292639
Gunungkidul	186232	163.67	203873	148.7	220479	157.1	238438	156.5	238056
Sleman	226256	117.53	247688	117	267107	117.3	288048	116.8	297170
Yogyakarta	265168	45.29	290286	37.8	314311	37.7	340324	37.6	353602

4.4 Data Kemiskinan di Yogyakarta

(Foto: Badan Pusat Statistik)

Selain masalah dana, permasalahan yang marak muncul di Yogyakarta adalah permasalahan mengenai tanah. Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi warga non-pribumi. Hal ini menjadi dasar masyarakat Tionghoa tidak boleh memiliki hak milih tanah di Yogyakarta, hal ini dimaksudkan sultan

agar rakyat Yogyakarta asli tidak tertindas dan tidak kehilangan tempat tinggal serta tanah mereka. Karena seperti yang diketahui bahwa masyarakat Tionghoa sangat kuat dalam sektor ekonominya di Indonesia sehingga sangat mudah dan memungkinkan untuk membeli tanah di Yogyakarta. Maka dari itu sultan memutuskan bahwa masyarakat Tionghoa tidak diperbolehkan memiliki hak milik tanah di Yogyakarta. Dibalik keistimewaannya yang masyhur di seluruh Indonesia, Yogyakarta tak lepas dari permasalahan-permasalahan layaknya kota-kota lain di negara ini. Menjadi daerah istimewa tidak berarti menjadikan Yogyakarta daerah yang sempurna. Permasalahan pasti tetap akan ada, maka dari itu rakyat beserta pemerintah Yogyakarta harus bekerja sama untuk membangun Yogyakarta yang lebih sejahtera dan semakin istimewa.

Selain permasalahan tanah, ada pula permasalahan yang ramai diperbincangkan di lingkup Kraton maupun di luar, hal itu tidak lain adalah permasalahan jabatan. Seperti yang kita ketahui, Sultan Hamengku Buwono X tidak memiliki anak laki-laki yang kelak akan menggantikan tahtanya sebagai seorang Sultan sekaligus sebagai Gubernur Yogyakarta. Hal itu yang saat ini

menjadi pertanyaan siapakah yang nantinya yang akan menggantikan HB X sebagai Sultan sekaligus Gubernur. KRT Jatiningrat mengatakan, sudah jelas dalam peraturan daerah istimewa pasal 3 ayat 1 bahwa perempuan tidak bisa menjadi Sultan maupun Gubernur Yogyakarta.

Sebenarnya permasalahan ini sudah lama muncul, namun mencuat kembali ketika Sultan HB X mengeluarkan sabdatama. Sabdatama yang berjumlah 8 poin tersebut memiliki satu inti, yakni tidak ada seorangpun yang boleh ikut campur dalam urusan pewarisan tahta kerajaan, baik itu orang dalam Kraton ataupun masyarakat Yogyakarta. Kelak, Sultan sendirilah yang akan mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisinya.

Beralih dari permasalahan tahta kasultananan, Yogyakarta yang istimewa ini memiliki harta yang sangat berharga yaitu kebudayaan yang tak ternilai harganya. Ada banyak kebudayaan Yogyakarta mulai dari seni tari, tembang jawa, hingga kerajinan seperti kain batik. Kebudayaan yang kental sangat melekat dengan Yogyakarta, hal ini lah yang membuatnya semakin

istimewa. Beberapa kebudayaan Yogyakarta hanya bisa dinikmati dan disaksikan pada hari-hari tertentu.

Djoko Suryo di Mata Keluarga dan Mahasiswanya

1. Djoko Suryo di Mata Keluarga



1.1. Foto kebersamaan Djoko Suryo dengan keluarga
(Foto: Dokumentasi keluarga)

Harko, anak sulung Djoko Suryo bercerita tentang bagaimana kehidupannya dengan sang ayah. Kedekatan Djoko dengan anaknya dapat diartikan layaknya orang tua sekaligus sahabat. Saat Harko masih kecil, Djoko selalu mengajarkan tentang kesabaran. Djoko tidak pernah memarahi anak-anaknya, dia sosok ayah yang sabar. Ketika Harko berbuat nakal, Djoko tidak pernah sekalipun memarahinya melainkan dengan hanya memberikan nasihat-nasihat hingga dia pada akhirnya mengerti bahwa perbuatannya keliru. Djoko mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang membuat anak-anaknya merasa bahwa Djoko merupakan sosok ayah yang penyabar. Dalam urusan pendidikan anaknya, Djoko memberikan kebebasan bagi anaknya untuk mengeksplorasi ilmu yang mereka sukai dan hanya memberikan arahan dengan bijak.

Setelah anaknya dewasa dan berkeluarga, Djoko masih tetap menjadi tempat untuk mencurahkan keluh kesah bahkan meminta saran dalam mendidik cucu-cucunya. Kebersamaan Djoko dengan keluarga tidak pernah lekang oleh waktu, di usianya yang sudah tua, beruntung bagi Djoko memiliki anak-anak yang masih perhatian dengan

dirinya. Terkadang Djoko menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan anak-anaknya, walaupun hanya sekedar makan bersama atau liburan bersama. Bagi Djoko nilai kebersamaan itu sangatlah penting, bahkan tidak bisa dibayar dengan berapa banyak harta yang diberikan. Harko menceritakan jika setidaknya dua kali dalam setahun keluarga besar Djoko menikmati waktu liburan bersama, yaitu pada saat Djoko dan istrinya berulangtahun yang kebetulan hanya berjarak satu hari dan juga pada saat lebaran.

Djoko sosok yang sangat romantis terhadap wanita, kemanapun Djoko pergi pasti akan ada wanita yang selalu setia menemani setiap langkahnya. Ya, wanita itu bernama Sri Latifah, dia adalah istri Djoko. Bahkan saat dulu Djoko melanjutkan studi S3 di Australia, istrinya pun ikut bersamanya. Tidak hanya istrinya, Djoko juga mengajak anak pertamanya, Eni. Sebagai anak dan sudah berkeluarga, Harko mengaku iri dengan kemesraan ayah dan ibunya, karena baginya di usia tua, Djoko masih sering jalan-jalan bersama istrinya dan selalu bersama kemana saja. Tak heran jika Djoko dikenal dengan ayah yang sangat mencintai keluarga.

Sebagai seorang anak, Harko diberi pesan oleh ayahnya, “*ojo gumunan*” yaitu jangan heran dengan perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya. Tak hanya itu, Djoko juga membekali anaknya agar tetap berfikiran positif dan optimis. Dengan sikap Djoko yang tidak pernah marah, Harko pun menjadi termotivasi dan menjadikan dirinya agar menjadi seperti ayahnya yang selalu bersikap sabar dalam segala hal.

Usia yang semakin bertambah tidak membuat Djoko malas dalam hal olahraga. Djoko selalu menyempatkan diri untuk berjalan-jalan kecil agar tubuhnya tetap sehat. Harko mengungkapkan bahwa ayahnya sangat selektif dalam hal memilih makanan. Terkadang kebersamaan saat berkumpul dengan seluruh anak-anaknya lah kunci dari kebahagiaan Djoko. Harko juga bercerita jika ayahnya lebih banyak diam saat berkumpul dengan keluarga besarnya, karena Djoko menemukan kebahagiaan yang tidak ada duanya lagi. Mungkin, itulah kunci dari kesehatan Djoko Suryo.

2. Djoko Suryo di Mata Mahasiswanya



1.2 Wahjudi Djaja, mahasiswa Djoko Suryo
(Fotografer: Hadyan Fikri Rosyadi)

Wahjudi mulai diajar oleh Djoko pada sekitar tahun 1991-1992 dalam mata kuliah Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia. Pada waktu itu, Djoko masih hangat-hangatnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra (Fakultas Ilmu Budaya). Cara mengajar Djoko sebagai dosen sangat demokratis, Djoko mampu menyajikan tema yang begitu luas menjadi pokok-pokok pembelajaran yang fokus dan menginspirasi mahasiswanya untuk mengejar

ilmu lebih jauh. Mahasiswa dengan sendirinya terangsang untuk mencari ilmu di berbagai tempat, misalnya di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan. Disana mereka melakukan *review* macam-macam buku yang sebelumnya telah diberikan berbagai opsi oleh Djoko dan mencari fakta baru dengan memanfaatkan buku-buku serta jurnal penelitian. Saat itu, semangat mahasiswa melakukan pencarian ilmu sangatlah luar biasa. Mereka mencari ilmu tidak hanya di satu program studi (prodi), tetapi mereka juga pergi ke prodi lain. Djoko sebagai dosen dinilai mampu menjadi fasilitator, dinamisator, serta inspirator. Dia berhasil membuat mahasiswa meluap-luap untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya.

Saat Djoko diangkat menjadi dekan, pagi-pagi sekali Djoko sering terlihat oleh mahasiswanya sedang berjalan dan melihat-lihat di sekitar fakultas. Menurut Wahjudi, hal itu Djoko lakukan untuk mengamati dinamika perkembangan fakultas yang dipimpinnya pada saat itu. Beberapa perubahan sempat Djoko berikan terhadap fakultasnya, seperti dalam urusan manajemen dan keterbukaan. Kepemimpinan Djoko telah membuka iklim bagi mahasiswa untuk berorganisasi. Dengan prinsip-prinsip hidup yang telah dia terapkan, tidak banyak

waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pengaruh pada jiwa mahasiswa-mahasiswa yang dia naungi. Wahjudi merasa baru dekat secara personal dengan Djoko setelah lulus. Menurut Wahjudi, Djoko merupakan tipe dosen yg kebabakan, demokratis, dan selalu memotivasi mahasiswanya untuk bergerak maju dengan meneliti serta menulis. Pada saat itu, mahasiswa sejarah diwadahi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan tulisannya ke dalam Majalah Historia. Majalah Historia biasa dipublikasian setiap 3-4 bulan sekali secara rutin. Mahasiswa mencari hal-hal atau fakta-fakta baru yang selanjutnya mereka teliti, lalu dituliskan disitu. Saat ini, Majalah Historia dijadikan referensi-referensi bagi mahasiswa prodi sejarah maupun yang ingin mendapatkan ilmu baru tentang sejarah.

Seharusnya, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu dijadikan sebagai *sparring partner*, bukan atasan-bawahan. Djoko tidak suka apabila dia ditakuti oleh mahasiswanya. Oleh karena itu, Djoko menjadikan dirinya sebagai sosok dosen yang terbuka. Para mahasiswa dapat menemui Djoko dimana pun selama dia sedang tidak ada kepentingan lain. Ketika Djoko diangkat menjadi dekan pun dirinya masihlah sama, tidak

berubah. Hal ini membuat Wahjudi terinspirasi akan sosok Djoko hingga diakuinya jika Djoko ia jadikan tauladan. Tentu saja, dengan sifatnya yang terbuka, mahasiswa menjadi lebih berani untuk aktif bertanya. Djoko juga dinilai mampu menjembatani mahasiswanya dari berbagai angkatan yang pernah sama-sama diajar Djoko. Wahjudi mengatakan jika sampai saat ini dirinya masih akrab dan saling berhubungan dengan kakak-kakak angkatannya melalui Facebook. Sebagai dosen, dirinya berhasil memayungi sambil membimbing mahasiswanya. Hal ini tentu dinilai sebagai kualitas yang luar biasa dan diharapkan ada pada semua dosen.

Pada tahun 2012, saat itu sedang hangat-hangatnya gerakan penetapan keistimewaan Yogyakarta. Hal ini menggerakkan Wahjudi serta rekannya untuk membentuk suatu agenda dimana para sastrawan dan penyair yang pernah tinggal di Jogja dikumpulkan menjadi satu untuk membuat puisi tentang Jogja. Sambutan yang diberikan dari para sastrawan dan penyair sangatlah meriah atas agenda tersebut. Saat buku itu jadi, lalu selanjutnya dibedah oleh Djoko, KRT. Jatiningrat, dan Prof. Faruk HT. Sejak pagi hingga siang hari mereka melakukan diskusi terhadap buku tersebut,

lalu pada malam harinya diadakan *launching* dimana semua puisi yang dimasukkan ke dalam buku tersebut dibacakan oleh penyairnya. Djoko mengambil andil dalam menguraikan proses hal-hal apa saja yang membuat Yogyakarta istimewa, KRT. Jatiningrat menguraikan dari sisi Kraton, lalu Prof. Faruk HT dari sisi budaya. Sebelumnya, tidak ada sastrawan ataupun penyair yang tergerak untuk membuat hal semacam ini. Setelah Satu Kata Istimewa, banyak yang kemudian mulai tergerak dan memberikan perkembangan baru.

Tentang Penulis



Namanya adalah Hadyan Fikri Rosyadi, lahir di Sleman, 15 Februari 1999, ia adalah anak ke dua dari dua bersaudara, buah dari pasangan Fauzi dan Retno Tri Asih. Fikri adalah

panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang Pegawai Negeri Sipil di sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, sedangkan Ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sejak kecil dia selalu di ajarkan oleh ayahnya untuk selalu rajin beribadah, mandiri dan pantang putus asa. Fikri menjalani kehidupan sejak kecil hingga dewasa di Kota Pelajar, Yogyakarta. Di kota inilah dirinya dapat mengerti akan indahnya kebudayaan yang ada.

Ketika berumur 6 tahun, ia memulai pendidikan di SDN Kentungan, Sleman, kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Depok di tahun 2011. Selepas lulus dari SMPN di tahun 2014, dia melanjutkan pendidikannya di SMAN 2 Ngaglik. Sejak kecil, Fikri sangat senang berbaur dengan masyarakat di lingkungannya. Baginya lingkungan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan karena

lingkungan masyarakat dapat menjadi faktor utama dalam membentuk pribadi yang peduli akan sesama.

Semasa sekolah, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah, Fikri bergabung dengan beberapa organisasi sekolah dan juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMA. Bergabung dalam organisasi menurutnya banyak pengalaman dan pembelajaran yang dapat diambil. Saat ini dia meneruskan pendidikannya di D3 Kearsipan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Kesan Fikri terhadap Bapak Djoko Suryo, ia merupakan orang yang sangat rajin dan tekun dalam menempuh pendidikan. Saat di kediaman Bapak Djoko, banyak ditemui buku-buku yang membuktikan bahwa di usia tuanya, ia tak pernah malas dalam membaca dan menambah ilmu. Tak hanya buku karya orang lain, banyak buku karya Bapak Djoko yang telah dibuat. Semangat untuk selalu belajar menjadi salah satu point yang patut untuk diteladani.

Pesan penulis kepada Bapak Djoko Suryo, Semoga Bapak Djoko Suryo selalu diberikan kesehatan dan semoga ilmu yang telah diberikan kepada semua orang dapat berguna di kemudian hari. Yogyakarta maupun Indonesia masih membutuhkan tokoh seperti Bapak Djoko Suryo.



Aulia Nurisyana Arkanti atau yang akrab disapa Aulia, terlahir pada tanggal 26 Juni 1999 di Bogor dari seorang ibu bernama Rika Susanti dan ayah bernama Arief Purnomo Putro. Aulia merupakan kakak dari seorang adik perempuan yang terpaut usia 5 tahun bernama Zahra.

Terlahir di Kota Hujan membuat Aulia senang sekali bermain di alam dan mengunjungi Kebun Raya Bogor untuk mengamati jenis-jenis flora serta fauna yang ada disekitarnya. Selain itu, Aulia sering kali travelling bersama dengan keluarganya. Telah banyak tempat yang dia kunjungi, mulai dari destinasi di wilayah domestik hingga internasional. Hal ini berhasil membuka pikiran dan wawasan Aulia dengan sangat luas. Hidupnya dipenuhi banyak sekali pengalaman berkat kehidupannya yang berpindah-pindah mengikuti sang ayah. Pada saat kelas 5 SD, Aulia diharuskan ikut dengan ayahnya yang dipindah dinaskan ke Yogyakarta. Disana dia menetap selama 4 tahun dan kembali lagi ke Bogor selama 1 tahun. Seusai kelulusan SMP, Aulia kembali mengikuti sang ayah bekerja ke Balikpapan. Disana dia berhasil

menyelesaikan pendidikan SMA lalu melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Gadjah Mada sebagai anak rantau.

Bagi Aulia, sosok Djoko sangatlah inspiratif. Kesan yang pertama kali muncul saat sedang mewawancarainya adalah bahwa Djoko merupakan sosok pribadi yang rajin, ulet, dan pantang menyerah. Kemudian pemahaman tersebut semakin berkembang seiring dengan proses penulisan biografi ini. Aulia meyakini bahwa Djoko sangatlah layak untuk dijadikan role model atas sifatnya yang cerdas, pekerja keras, penyabar, serta memiliki prinsip hidup yang baik.

Semoga Bapak Djoko Suryo selalu diberikan kesehatan dan semua ilmu serta jasa yang telah bapak berikan, terutama kepada UGM, Yogyakarta, dan Indonesia dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.



Dinda Lusiana, perempuan kelahiran Sleman 18 tahun yang lalu, tepatnya 17 Juli 1999. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Esti Sudiharto dan Retno Kadarsih. Ia mempunyai hobi bernyanyi, menonton

film atau drama, dan menulis tentang apa yang ia rasakan di media sosial seperti instagram, line, maupun blog. Dinda memulai pendidikan di umurnya yang ke 5 tahun di TK ABA AL Jihad Klajuran, kemudian SD Negeri Pengkol tamat pada tahun 2011, SMP Negeri 3 Godean tamat pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Godean tamat pada tahun 2017. Sekarang ia sedang menempuh Pendidikan di D3 Kearsipan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.

Kesan Dinda dalam membuat biografi Bapak Djoko Suryo bersama teman-teman satu timnya cukup banyak. Ia mengambil hal dalam diri Bapak Djoko Suryo yang pertama, beliau adalah sosok orang yang sangat menyayangi keluarganya, kedua beliau orang yang pekerja keras, dan ketiga beliau orang yang memiliki

tekad kuat untuk meraih apa yang beliau inginkan. Ia sangat senang sekali dapat mengenal Bapak Djoko Suryo lewat project pembuatan buku biografi ini. Satu hal lagi yang menjadi kebanggaan bagi Dinda pula adalah ia yang merupakan mahasiswa D3 Kearsipan UGM. Karena pada mulanya program studi Kearsipan Universitas Gadjah Mada ini merupakan rintisan program studi yang Bapak Djoko perjuangkan untuk terbentuk. Inilah beliau sosok yang sangat menginspirasi dan berkesan dalam hidupnya.



Terlahir di Sleman, 07 April 1998. Seorang anak laki-laki lahir kedunia dengan penuh suka cita, terlahir dengan badan kurus kecil tak berdaya adalah Dwidha Surya Prakasa dan kerap disapa Dedha. Waktu terus berlalu, ia memulai pendidikannya di TK Negeri 1 Sleman dan lanjut ke SD Negeri Percobaan 2. Lalu, ia bersekolah

di SMP Muhammadiyah 3 Depok yang bertepatan di Komplek Colombo Gejayan. SMP berlalu, ia melanjutkan SMA di SMA Gajah Mada yang bertepatan di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Penuh lika-liku untuk berjuang sampai saat ini di Universitas Gajah Mada di Jurusan Kearsipan Sekolah Vokasi UGM. Kedepannya Dedha akan berjuang untuk menentukan nasibnya yang akan ia jalani dengan keluarganya kelak.

Hal yang berkesan bagi Dedha selama wawancara dengan Pak Djoko Suryo adalah beliau dengan umur yang sudah dibilang tidak muda lagi, tetapi masih bersemangat dalam menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Semangat perjuangan masih melekat pada dirinya yang

menyebabkan beliau memiliki semangat juang tinggi dalam menuntut ilmu.



Fitri Yuli Angraini anak kedua dari 3 bersaudara. Ia lahir di Bekasi, 11 Juli 1999. Ia menempuh pendidikan mulai dari TK AT-Taubah, lalu melanjutkan SD di Setia Mekar 04. Setelah itu menempuh ke jenjang SMP

Negeri 6 Tambun Selatan dan berlanjut ke SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Saat ini Fitri sedang menempuh Pendidikan di salah satu Universitas terbaik di Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada pada program studi D3 Kearsipan.

Banyak hal yang ia dapatkan selama melakukan wawancara dengan Pak Djoko. Menurutnya, Pak Djoko adalah sosok yang sangat ramah dan baik hati. Ia semakin mengenal Yogyakarta karena Pak Djoko. Ilmu yang Pak Djoko berikan lewat wawancara yang telah ia dan teman-temannya lakukan sangat banyak. Ia sangat berkesan sekali dapat mengenal Pak Djoko.



Inggar Rahmi Irwanti yang biasa dipanggil dengan Inggar, lahir di Sleman pada tanggal 14 September 1998. Ia adalah anak pertama dari pasangan Suradi dan Hari Supriyati. Ia memiliki banyak hobi seperti bermain basket, mendengarkan musik,

bernyanyi, membaca novel dan juga menonton film. Pendidikan pertama Inggar ketika berusia 5 tahun di TK ABA Rewulu Kulon, pada tahun 2005 dilanjutkan di SD Negeri Semarangan 2. Tahun 2011 ia masuk di SMP Negeri 3 Godean dan lulus pada tahun 2014 yang dilanjutkan di SMA Negeri 1 Godean. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan di D3 Kearsipan Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Kesan yang Inggar dapatkan selama proses pembuatan biografi Bapak Djoko Suryo adalah kesabaran, keuletan, kegigihan Pak Djoko Suryo dalam memperjuangkan pendidikan. Serta sikap tanggung jawab yang selalu ia tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pak Djoko Suryo menyadarkan ia sebagai orang Jogja untuk



lebih mengenal dan terus melestarikan budaya Yogyakarta. Pak Djoko Suryo juga memberikan tambahan pemahaman mengenai Kraton Yogyakarta dan perannya bagi Indonesia yang membuat Inggar semakin bangga menjadi masyarakat Yogyakarta.

Intan Ramadhanti, lahir di Subang pada 11 Januari 1999 atau tepatnya pada 19 tahun silam. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ia menempuh pendidikan di mulai dari TK Pertiwi, lalu melanjutkan di SD N 1 Sedan, setelah itu ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP N 1 SEDAN dan jenjang menengah atas di SMA N 1 Rembang. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan jenjang diploma di Universitas Gadjah Mada dengan prodi D3 Kearsipan. Ia memiliki hobi memasak karena ia suka makan, makanan yang ia sukai adalah makanan yang bercita rasa pedas. Sejak kecil, ia memiliki cita-cita menjadi seorang dokter,

namun tentu saja cita-cita itu tidak bisa terwujud karena sekarang ia berada di jurusan bukan kedokteran. Ia memiliki sebuah *quote* yaitu *Believe dream and make it happen*. Percayailah semua mimpimu akan terwujud, dan berusahalah untuk mewujudkannya. Proses pembuatan buku biografi seorang tokoh merupakan pengalaman pertama dan sangat berharga bagi penulis, banyak pelajaran yang didapatkan. Penulis dapat mencontoh sifat-sifat positif yang dimiliki tokoh. Tokoh yang di sini adalah Prof. Djoko Suryo sangat kooperatif dalam bekerja sama. Semoga buku biografi ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana dinamika masa kecil Bapak?
2. Pada tahun 1939 ada peristiwa apa?
(menurut/bersumber dari cerita orang tua)
3. Apa perbedaan mengajar di Pekalongan dan Kulonprogo?
4. Kenapa memutuskan pindah mengajar di Kulonprogo ?
5. Bagaimana awal keterlibatan Bapak dalam proses penetapan keistimewaan Jogja?
6. Mengapa Jogja menjadi daerah istimewa? Apa yang melatarbelakangi?
7. Sejak kapan Bapak terjun dalam keistimewaan Jogja?
8. Kendala apa saja yang Bapak hadapi saat menjadi penasehat?
9. Menurut Bapak pribadi, apa yang membuat Jogja menjadi istimewa?
10. Tokoh lain yang ikut andil dalam keistimewaan Jogja?
11. Hal apa yang membuat Bapak mau andil dalam perumusan keistimewaan Jogja?
12. Menurut Bapak, perbedaan apa saja yang ada di dalam masyarakat saat sebelum dan sesudah keistimewaan Jogja?
13. Gagasan apa saja yang Bapak sampaikan kepada Gubernur terkait keistimewaan Jogja? (usulan yang diterima maupun tidak)
14. Kenapa Bapak memilih jurusan sejarah?
15. Bagaimana kehidupan semasa Bapak berkuliah dulu? (dosen, mata kuliah favorit)

16. Menurut Bapak apa peran UGM dari waktu ke waktu (peran bagi masyarakat, bangsa, dan negara)
17. Setelah lulus langsung jadi dosen atau bagaimana?
18. Apa saja kendala Bapak saat menjadi dekan di FIB?
19. Prestasi apa saja yang Bapak dapatkan selama menjadi dekan?
20. Karya apa saja yang Bapak hasilkan?
21. Bapak tertarik pada buku apa?

PENUTUP



Keistimewaan Yogyakarta telah melekat pada diri Djoko Suryo, sosok yang mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk merumuskan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Sesuatu yang telah dibentuk dengan penuh perjuangan harus dipertahankan, layaknya kraton yang menjadi pusat kebudayaan yang harus tetap berdiri kokoh hingga akhir zaman.

Sosok Djoko mengajarkan arti sebuah komitmen, kegigihan, dan dedikasi tinggi yang patut dicontoh oleh para generasi muda penerus bangsa. Kelak, para generasi mudalah yang memiliki peran penting dalam melestarikan

budaya dan keistimewaan Yogyakarta. Teruslah istimewa dan tetap membara, Yogyakarta.

LAMPIRAN FOTO



1.1 Beberapa Koleksi Buku Djoko Suryo



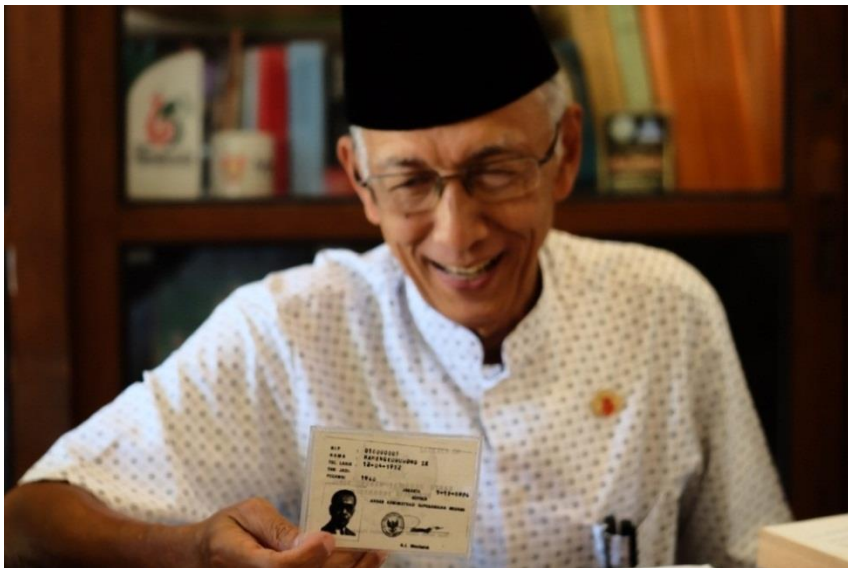
1.2 Buku Karya Djoko Suryo



1.3 Djoko Suryo saat bersama karyanya



1.4 KRT Jatinigrat



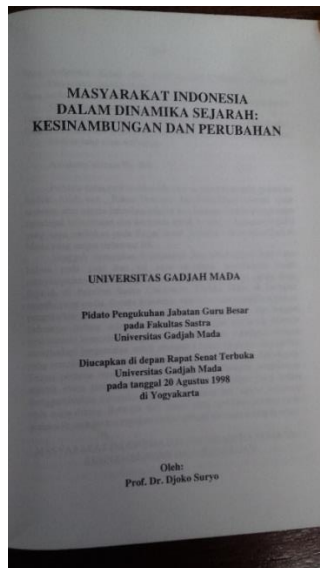
1.5 KRT. Jatinigrat saat menunjukan KTP Sri Sultan HB IX



1.6 KRT. Jatiningrat saat menunjukan buku “Tahta Untuk Rakyat”



1.7 Harko, Putra sulung Djoko Suryo



1.8 Pidato Pengukuhan Djoko Suryo saat menjadi Guru Besar Fakultas Sastra UGM



1.9 Berita Koran Tabloid Mingguan Adil tentang Aksi Mahasiswa memadati boulevard UGM

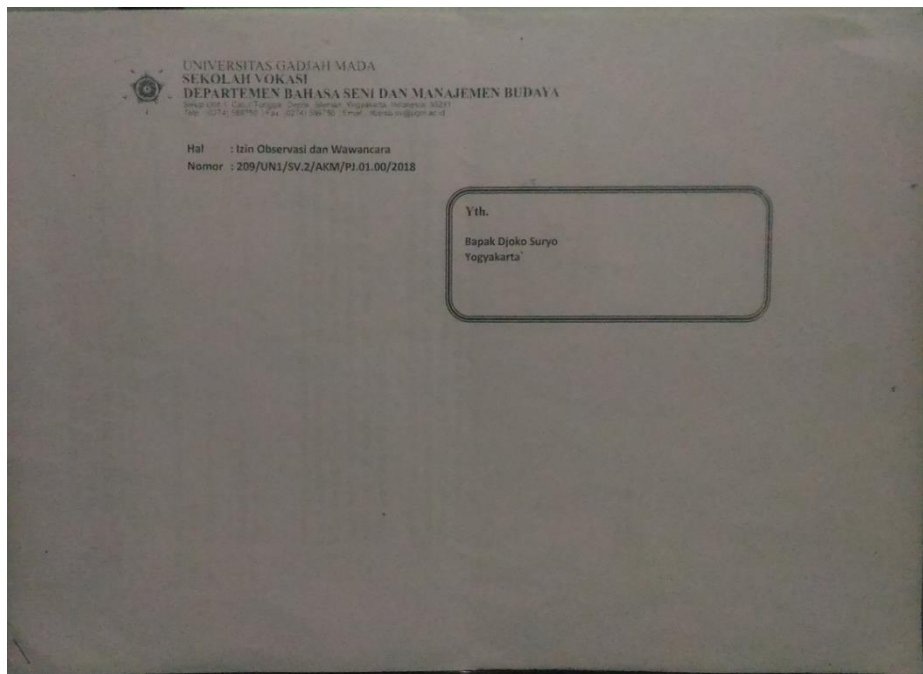


1.10 Tim Penulis Biografi saat bersama Djoko Suryo di kediamannya



1.11 Tim Penulis saat bersama KRT. Jatiningrat di Kraton Yogyakarta

Foto Surat Pengantar





UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH VOKASI
DEPARTEMEN BAHASA SENI DAN MANAJEMEN BUDAYA

Jalan Sekeloa Timur, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 589 750 Fax. (0274) 589 755 Email: dsasv@ugm.ac.id

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Nomor : 209/UN1/SV.2/AKM/PI.01.00/2018
Lamp. : 1 lembar
Hal : Izin Observasi dan Wawancara

Yth. Bapak Djoko Suryo
Yogyakarta

Berkaitan dengan penyelenggaraan Mata kuliah Dokumentasi dan Publikasi pada Program Studi Kejurusan Sekolah Vokasi UGM, terdapat salah satu kegiatan berupa Observasi dan Wawancara dengan Bapak Djoko Suryo, guna menambah wawasan mahasiswa. Berkennen dengan hal itu, mohon mahasiswa kami dapat diperkenankan melaksanakan Observasi dan Wawancara. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 26 Februari 2018 - 26 Maret 2018. Adapun nama mahasiswa terlampir.

Apabila berkenan, untuk konfirmasi lebih lanjut Bapak/Ibu pimpinan dapat menghubungi Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi UGM dengan no. Tlp 0274 - 589750, fax (0274) 589750, atau Email : dsasv@ugm.ac.id
Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua
Departemen


Liliyan Putri Ekantari, S.Hum., M.A.
NIP. 198401112015042001

TEMBUSAN
1. Kaprodi Kejurusan SV
2. Mahasiswa /ibu

Nomor: 2005/UN1/SV-3/AKM/P1/01.00/2018

Langkah

No.	Nama	NIM
1	Hadyan Fiki Rosyadi	17415547/SV/13412
2	Aulia Nurisyana A	17416377/SV/14115
3	Dwidhu Surya Prakasa	17416382/SV/14120
4	Intan Ramadhanti	17416392/SV/14130
5	Dinda Lustrana	17415543/SV/13408
6	Fitri Yuli Angraeni	17410874/SV/12801
7	Inggar Ratani Irwanti	17416391/SV/14129

SUMBER REFERENSI

Edzan Raharjo. 2017. Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 Meningkatkan Jadi Rp. 1 T. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3768510/dana-keistimewaan-diy-tahun-2018-meningkat-jadi-rp-1-t>. Diakses pada Selasa, 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB.

Dikpora. 2017. Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta. http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=1. Diakses pada Kamis, 3 Mei 2018 pukul 18.00 WIB.

Wikisource. 2016. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_3_Tahun_1950. Diakses pada Kamis, 3 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.

Okky Ardiansyah. 2017. Sistem Pemerintahan Keraton Yogyakarta Pada Masa Perang Kemerdekaan Tahun 1945-1951. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/viewFile/9465/9117>. Diakses pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.

Koran Tabloid Berita Mingguan Adil Edisi Khusus Tahun ke-66, 21 Mei 198 Halaman 7 tentang aksi mahasiswa di boulevard UGM.

Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Ilmu-Ilmu
Humaniora periode (1949-1999). Gadjah Mada
University Press. 2000